

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENGEMBANG
UNTUK MEMBERIKAN RUMAH SUSUN BAGI MASYRAKAT
BERPENGHASILAN RENDAH DIKAITKAN DENGAN ASAS
*GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)***

Desman Simanjuntak
(1287038)

ABSTRAK

Dewasa ini, untuk mendapatkan lahan untuk bertempat tinggal khususnya di daerah perkotaan di Indonesia sangatlah sulit, hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang ingin memiliki atau bertempat tinggal di daerah kota-kota besar yang terdapat di Indonesia, contohnya seperti di daerah Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan kota-kota lainnya, oleh karenanya Rumah Susun berfungsi sebagai tempat tinggal alternatif bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan untuk ditinggali. Permasalahannya, tidak semua kalangan masyarakat dapat memiliki Rumah Susun. Hal ini dikarenakan harga untuk sebuah unit Rumah Susun terbilang mahal sehingga sulit bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memilikinya. Oleh sebab itu, di dalam Undang-Undang nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun khususnya pasal 16 ayat (2) disebutkan bahwa pengembang Rumah Susun Komersil harus memberikan hak sebesar 20% untuk mendirikan suatu Rumah Susun Umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah, namun pada praktiknya Pengembang tidak mematuhi peraturan tersebut, serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak menerapkan peraturan tersebut secara tegas.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif karena sasaran penelitian ini adalah hukum. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yaitu antara lain dengan menganalisis dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam praktik niaga di Indonesia, dalam hal ini Undang-undang nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, buku-buku literatur tentang hukum, dan majalah serta media massa.

Penelitian ini membuktikan bahwa masih banyak pengembang Rumah Susun yang tidak mematuhi Undang-undang Rumah Susun khususnya pasal 16 ayat (2) Undang-undang Rumah Susun serta tiadanya peran Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menegakkan peraturan tersebut sehingga masih terjadi kesenjangan sosial antara masyarakat berpenghasilan tinggi dan masyarakat berpenghasilan rendah dalam kepemilikan Rumah Susun.

Kata kunci: rumah susun, kesenjangan sosial

**JURIDICAL REVIEW ON LEGAL RULES OF DEVELOPER'S
RESPONSIBILITY ON HANDLING OUT APARTMENTS FOR CITIZENS
WITH LOW SALARIES REGARDING GOOD CORPORATE
GOVERNANCE PRINCIPAL (GCG PRINCIPAL)**

Desman Simanjuntak
(1287038)

ABSTRACT

Nowadays, it is proven difficult to find a living space in Indonesian cities. This is due to high demand by Indonesian citizens who wish to live in major cities such as Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, and many other major cities in Indonesia, which is why Apartments serve as alternatives for people who cannot find places to live in. The problem is not all citizens can afford Apartments. This is due to the high price offered by Apartments, which means that citizens who have low income definitely have problems affording a unit. Therefore, pursuant to article 16 section (2) of the Law No. 16/2011 of the Apartment Act, it is clearly stated that a Commercial Apartment Developer should give 20% rights to low-income citizens to establish apartment units, however some Developers do not oblige to such rules and the Province Government do not enforce the rules in a correct manner.

The method used in this research is normative juridical because this research aims to review legal rules. Normative juridical research is a research done by reviewing legal books which includes thorough analysis on legal rules such as Law No. 16/2011 of the Apartment Act, legal literatures and journals as well as mass media.

This research proves that Developers do not oblige to rules established by the nation especially those included in article 16 section (2) of the Apartment Act as well as the absence of Government's intervention in establishing such rules in West Java Province, which cause gap between low-income citizens and high-income citizens.

Keywords: apartment, social gap

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Penelitian	12
E. Kerangka Pemikiran	13
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II PNEGAKKAN HUKUM TERHADAP PIHAK PENGEMBANG RUMAH SUSUN DI DALAM MEMBERIKAN JATAH RUMAH SUSUN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DIKAITKAN DENGAN ASAS GOOD CORPORATE GOVERNANCE	
A. Sistem Pemerintahan	23
B. Dasar Sistem Pemerintahan di Indonesia	27
C. Tugas Pokok, Fungsi, dan Kewenangan Pemerintah Berkaitan Dengan Pemberian Unit Rumah Susun Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	31
D. <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	46
BAB III KEWAJIBAN HUKUM PENGEMBANG RUMAH SUSUN DALAM MEMBERIKAN JATAH RUMAH SUSUN YANG DIPERUNTUKKAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH	
A. Tinjauan Umum Mengenai Rumah Susun	54
B. Badan Hukum di Indonesia	99
C. <i>Corporate Social Responsibility</i>	107
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA	
A. Pelaksanaan Pasal 16 ayat (2) Undang – Undang No. 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun jika dikaitkan dengan	

asas <i>Good Corporate Governance (GGC)</i>	110
B. Bagaimana sanksi terhadap pihak pengembang Rumah Susun yang tidak menjalankan ketentuan pasal 16 ayat (2) Undang – Undang No. 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun bila dikaitkan dengan asas <i>Good Corporate Governance (GCG)</i>	120
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	126
B. Saran	128
DAFTAR PUSTAKA	130

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Provinsi	4